



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. H.M. Rafi'i No.3 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21052

LAPORAN PENDAHULUAN

Penyusunan

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)

Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2018

Pangkalan Bun, 3 Juli 2018



LATAR BELAKANG

- Berdasarkan **evaluasi program penanggulangan kemiskinan** di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, bahwa **realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2013 belum tercapai**, dan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu setiap SKPD teknis untuk fokus dan tepat sasaran pada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat → ingin **meningkatkan fokus program-program penanggulangan kemiskinan** yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan **gerakan bersama** tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga **memerlukan keterlibatan** semua pihak selaku pemangku kepentingan.
- Setiap program SKPD diharapkan **tepat sasaran** untuk mencapai target RPJMD sebesar **3%** untuk **program penanggulangan kemiskinan**.
- Dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperkuat dan lebih memfokuskan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut, maka perlu untuk menyusun **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)** sebagai pedoman menyusun program aksi penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana **deskripsi kondisi sosial budaya** masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat?
- b. Bagaimana **potensi sumberdaya lokal** Kabupaten Kotawaringin Barat?
- c. Bagaimana **kondisi dan peran stakeholders lokal** di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- d. Bagaimana **pendekatan yang sesuai** untuk menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- e. Bagaimana **rumusan program aksi yang sesuai** untuk menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat?

TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan

Menyusun dokumen **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah** sebagai landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah, TKPKD, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam **mengentaskan kemiskinan secara sinergis** di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sasaran Kegiatan

- Mengidentifikasi **kondisi umum daerah** Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengidentifikasi **profil kemiskinan daerah** Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menganalisis **prioritas intervensi kebijakan daerah** untuk penanganan kemiskinan.
- Menganalisis **anggaran pendapatan dan belanja daerah** untuk penanganan kemiskinan.
- Mengkaji ulang **kebijakan dan kelembagaan daerah yang berperan** dalam penanggulangan kemiskinan.
- Menganalisis **isu-isu strategis pembangunan daerah**.
- Menganalisis **prioritas kegiatan, hambatan dan kendala** dalam penanggulangan kemiskinan.
- Merumuskan **program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan** penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Merencanakan **sistem monitoring dan evaluasi** penanggulangan dan pengendalian kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

RUANG LINGKUP WILAYAH ADMINISTRASI KAB. KOTAWARINGIN BARAT

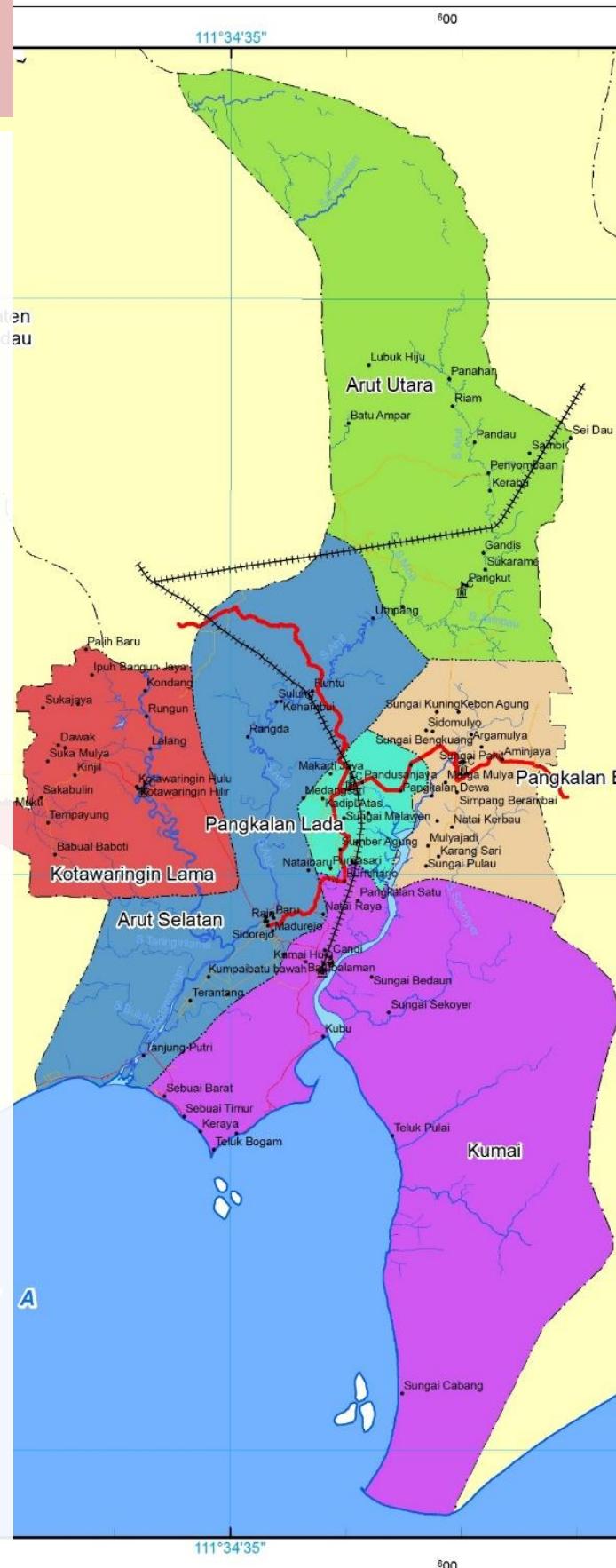
RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Analisis dokumen kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan

- Inventarisasi dan mengkaji **dokumen kebijakan nasional** terkait penanggulangan kemiskinan;
- Inventarisasi dan **mengkaji dokumen kebijakan provinsi** terkait penanggulangan kemiskinan; dan
- Inventarisasi dan mengkaji **dokumen kebijakan daerah** terkait penanggulangan kemiskinan.

B. Penyusunan dokumen SPKD, meliputi materi:

- **Identifikasi kondisi umum daerah**, antara lain:
 - Posisi dan orientasi wilayah
 - Kondisi fisik wilayah
 - Kondisi kependudukan (sosial, ekonomi, dan budaya)
 - Kondisi kelembagaan
 - Kondisi sarana dan prasarana
 - Kepemilikan KTP
- **Profil kemiskinan daerah**, antara lain:
 - Konsep kemiskinan
 - Kondisi umum kemiskinan daerah



- **Prioritas intervensi kebijakan**, antara lain:
 - Capaian bidang pendidikan
 - Capaian bidang kesehatan
 - Capaian bidang infrastruktur dasar
 - Capaian bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan
- **Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah**, antara lain:
 - Kinerja keuangan masa lalu
 - Kebijakan pengelolaan keuangan
 - Kerangka pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan
- **Kajian kebijakan dan kelembagaan**, antara lain:
 - Pemetaan program nasional, regional dan lokal untuk penanggulangan kemiskinan
 - Kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian
 - Permasalahan koordinasi dan penguatan kelompok kerja TKPK
- **Analisis isu-isu strategis**, antara lain:
 - Permasalahan pembangunan daerah
 - Isu strategis pembangunan daerah
- **Analisis prioritas kegiatan, hambatan dan kendala** dalam penanggulangan kemiskinan.
- **Rumusan program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan** penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- **Rencana sistem monitoring dan evaluasi** penanggulangan dan pengendalian kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA DAN PEMETAAN PENDIDIKAN DAN KEMISKINAN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ORIENTASI SKALA

KETERANGAN

- Kantor Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Kecamatan
- Desa
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Perairan

SUMBER :
Peta Dasar :
- Peta Rupa Bumi (RBI) Skala 1 : 25.000,
- Bakosurtanal Tahun 2001
- RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan upaya **penanggulangan kemiskinan** menjadi **prioritas utama** →tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk **mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada tahun 2015** melalui ***Millennium Declaration***.

MDGs berakhir th 2015 → telah bergeser ke **SDGs (*Sustainable Development Goals*)** sesuai yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, dan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);

2. Perpres No. 59 Tahun 2017

Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam lampiran **disebutkan tujuan Global: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019** diantaranya adalah **Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%)**.

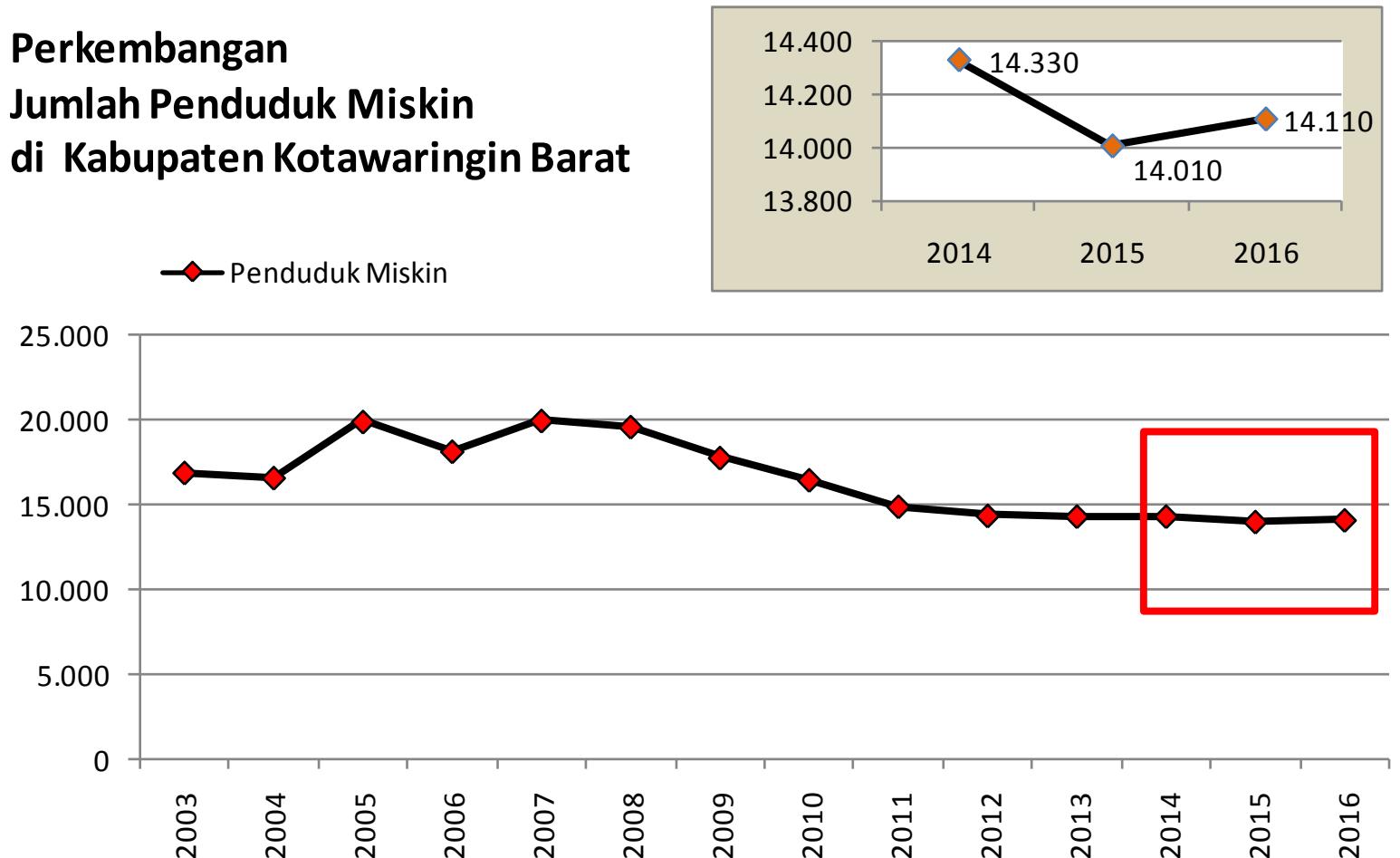
Lanjutan...

2. **Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. **Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014** Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. **Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010** tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
5. **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014** Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010** tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. **Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025.
8. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.**

GAMBARAN UMUM KONDISI KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN PENDUDUK KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Kotawaringin Barat, tahun 2016 menunjukkan **sebagian besar (84,28%) masih berada dalam tahapan pra Sejahtera** dan sisanya 15,72% masuk katagori keluarga Sejahtera I.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat



Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, dari 2003-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 9,05% tahun 2003 menjadi 4,96% tahun 2016. Namun antara tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi sedikit kenaikan sekitar 100 penduduk miskin.

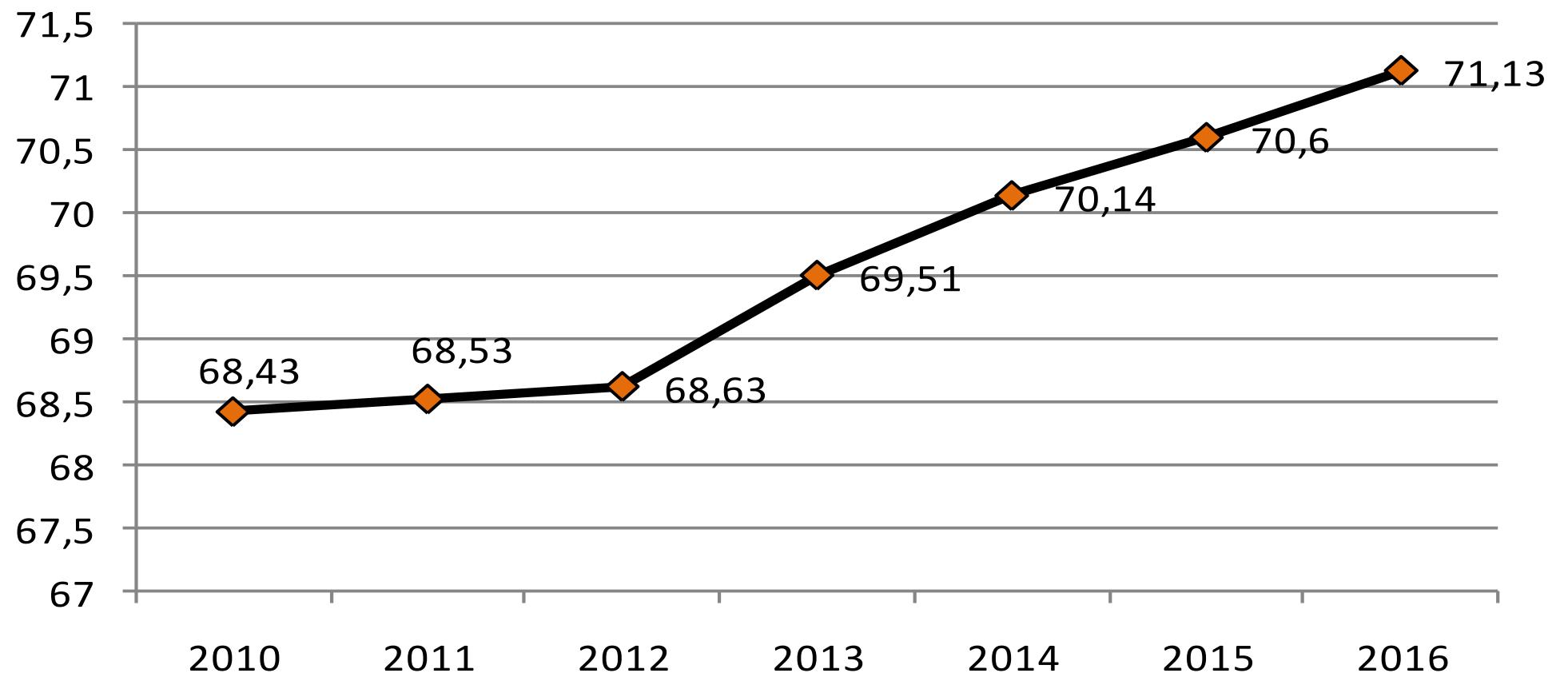
Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Perkapita	IPM
2010	69,41	11,27	7,48	11.707	68,43
2011	69,51	11,28	7,48	11.757	68,53
2012	69,6	11,29	7,49	11.807	68,63
2013	69,68	11,9	7,58	11.857	69,51
2014	69,77	12,12	7,82	11.908	70,14
2015	70,07	12,13	8,01	11.979	70,6
2016	70,21	12,42	8,05	12.101	71,13

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2017.

Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotawaringin Barat, dirinci antara 2010- 2016, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya.

IPM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016

—◆— IPM



PENDEKATAN DAN METODOLOGI

PENDEKATAN PERENCANAAN

Pendekatan *Participatory Planning*

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan di daerah dan instansi terkait dalam pekerjaan **Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah** serta meningkatkan peranserta mereka dan peranserta pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan kegiatan penyusunan dokumen ini.

Pendekatan *Mixed Scanning*

- ***Mixed Scanning*** merupakan pendekatan perencanaan secara terpisah, berdasarkan pertimbangan menyeluruh. Pada hakekatnya pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan Rasional Menyeluruh dengan Pendekatan Terpisah. Masing – masing dalam kadar dan lingkup tertentu, yaitu menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup wawasan sekilas (scanning) dan memperdalam tinjauan atas unsur – unsur atau sub sistem yang strategis, dalam kedudukan sistem terhadap permasalahan tersebut.

PENDEKATAN ILMIAH PENYUSUNAN LAPORAN

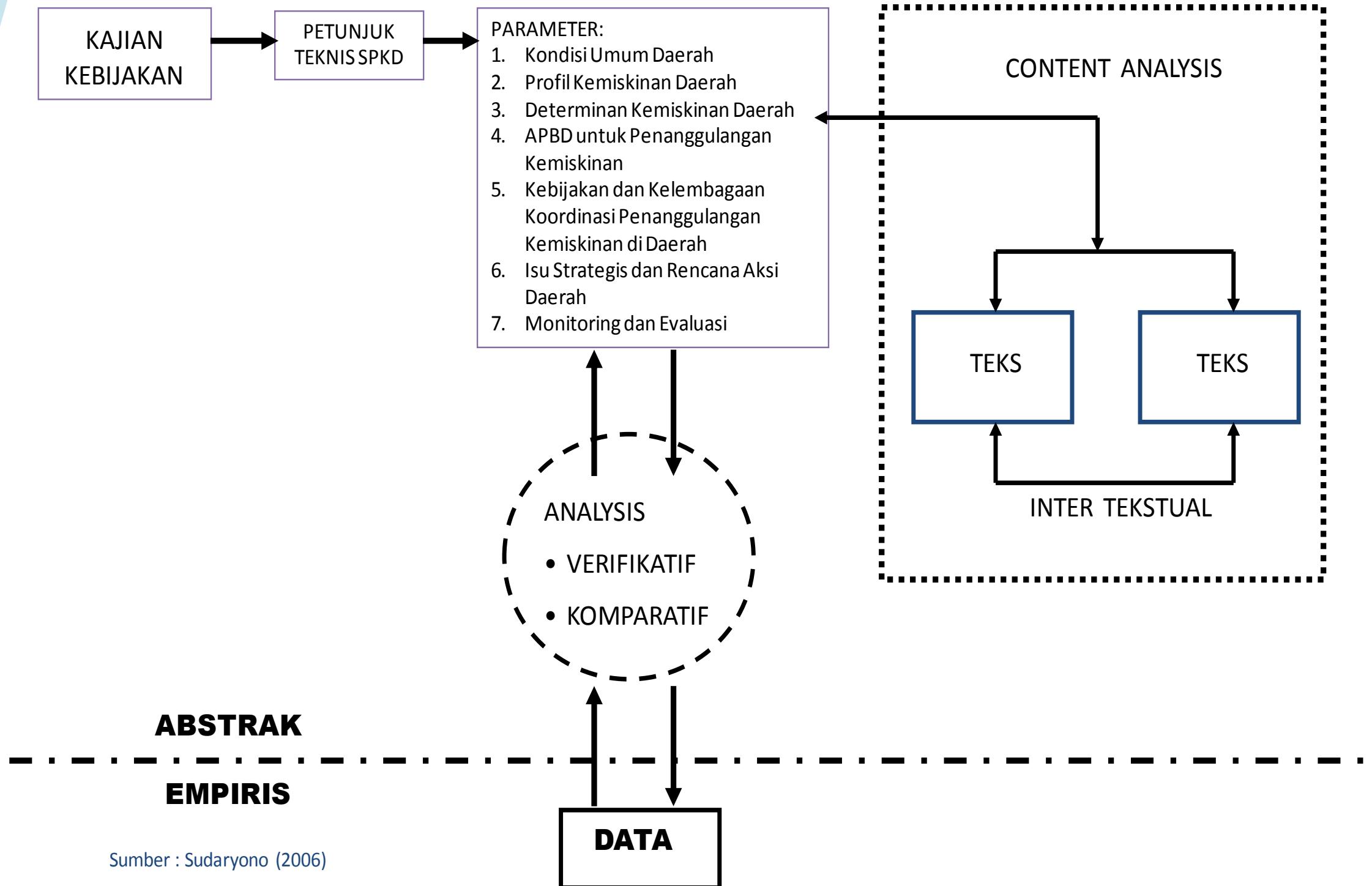
Pendekatan Deduktif Kualitatif Rasionalistik

Pendekatan deduktif kualitatif ini menekankan pada prosedur yang ketat dalam menentukan parameter dan variabel penelitian yang dalam kajian ini berkaitan dengan konsep **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)**.

Pendekatan kuantitatif dalam kajian ini mementingkan adanya **parameter dan variabel-variabel dari Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD** sebagai obyek penelitian dan parameter dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk operasionalisasi variable masing-masing untuk kegiatan ini.

Penekanan parameter dan variabel sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD, ini dikarenakan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan **procedural planning**, yang sangat menekankan pada capaian standart minimal dalam pedoman/petunjuk teknis.

METODE DEDUKTIF KUALITATIF “RASIONALISTIK” UNTUK KAJIAN SPKD



TAHAPAN ANALISIS DAN ALAT ANALISIS

Beberapa tahapan penyusunan laporan pekerjaan pkekerjaan serta tahapan analisis analisis sesuai **buku Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD** adalah sebagai berikut:

Tahap pelaksanaan penyusunan laporan pekerjaan:

- | | |
|-------|--|
| Tahap | 1. Menyusun Pendahuluan |
| Tahap | 2. Menyusun Kondisi Umum Daerah |
| Tahap | 3. Menyusun Profil Kemiskinan Daerah |
| Tahap | 4. Menyusun Determinan Kemiskinan Daerah |
| Tahap | 5. Menyusun Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan |
| Tahap | 6. Menyusun Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. |
| Tahap | 7. Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah |

SASARAN KAJIAN DAN TAHAPAN ANALISIS	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA
<p>1. Mengidentifikasi kondisi umum daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<p>1. GEORGAFI DAN DEMOGRAFI WILAYAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Posisi dan orientasi wilayah b. Kondisi fisik wilayah c. Kondisi kependudukan (sosial, ekonomi, dan budaya) d. Kondisi kelembagaan e. Kondisi sarana dan prasarana f. Kepemilikan KTP <p>1. ADMINISTRASI WILAYAH</p> <p>2. EKONOMI: Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi, Inflasi, Ketenagakerjaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPS 2. Bappeda 3. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
<p>2. Mengidentifikasi profil kemiskinan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<p>1. KONSEP KEMISKINAN: data pemenuhan kebutuhan dasar, kesenjangan beban pengeluaran per kapita perbulan,</p> <p>2. KONDISI KEMISKINAN DAERAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemiskinan Konsumsi:, Kemiskinan : <ul style="list-style-type: none"> i. prosentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, indeks kemiskinan. ii. Target dan capaian RPJPD, RPJMD dan MDGs (Series 5 tahun). iii. indikator Utama Bidang Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar SD/MI , SMP/MTs, SMA/MA • Angka Partisipasi Murni SD/MI SMP/MTs, SMA/MA • Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun • Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun • Angka Putus Sekolah Usia 16-18 tahun. <ul style="list-style-type: none"> i. Angka Kematian Bayi Dan Umum ii. ketersediaan pelayanan atau program pemerintah iii. pemanfaatan layanan atau program a. Non-Konsumsi (Multidimensi) <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah dan sebaran Sarana Pendidikan, Kesehatan, Dan Pelayanan Publik Lainnya ii. Kemudahan pencapaian terhadap fasilitas yang ada iii. Ketersediaan dan sebaran infrastruktur dasar iv. Ketahanan pangan, ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPS 2. Bappeda 3. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 4. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 5. Dinas Kesehatan 6. Disperindagkop & UKMkop & UKM 7. DPUPR 8. Dinsos 9. Dinakestrans 10. Sekda Kesra

SASARAN KAJIAN DAN TAHAPAN ANALISIS	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA
<p>3. Menganalisis prioritas intervensi kebijakan daerah untuk penanganan kemiskinan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian bidang pendidikan 2. Capaian bidang kesehatan 3. Capaian bidang infrastruktur dasar 4. Capaian bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan 5. prioritas dan target program dalam RPIJM, RPJMD dan MDGs. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPS 2. Bappeda 3. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa) 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kesehatan 6. Disperindagkop & UKM 7. DPUPR 8. Dinsos, Dinakestrans, Sekda Kesra
<p>4. Menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan kemiskinan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan masa lalu 2. Kebijakan pengelolaan keuangan 3. Kerangka pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa) 3. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 4. Dinas Kesehatan 5. Disperindagkop & UKM 6. DPUPR 7. Dinsos, Dinakestrans, Sekda Kesra
<p>5. Mengkaji ulang kebijakan dan kelembagaan daerah yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan program nasional, regional dan lokal untuk penanggulangan kemiskinan 2. Kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian 3. Permasalahan koordinasi dan penguatan kelompok kerja TKPK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa) 3. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 4. Dinas Kesehatan 5. Disperindagkop & UKM 6. DPUPR 7. Dinsos, Dinakestrans, Sekda Kesra

SASARAN KAJIAN DAN TAHAPAN ANALISIS	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA
<p>6. Menganalisis isu-isu strategis pembangunan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan pembangunan daerah 2. Isu strategis pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. BPS 3. DPUPR 4. Dinsos, Dinakestrans, Sekda Kesra
<p>7. Menganalisis prioritas kegiatan, hambatan dan kendala dalam penanggulangan kemiskinan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data karakteristik dan konsep kemiskinan daerah; 2. Informasi hambatan dan kendala penanganan masalah kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. BPS 3. DPUPR 4. Dinsos, Dinakestrans, Sekda Kesra
<p>8. Merumuskan program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi, masalah, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan target capaian dalam RPJPD, RPJMD dan SDGs 2. Data statistik bidang pengentasan kemiskinan (diatsa) 3. Data /informasi program pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. BPS 3. DPUPR 4. Dinsos, Dinakestrans, Sekda Kesra
<p>9. Merencanakan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan dan pengendalian kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<p>Hasil olah data pada sub analisis sebelumnya.</p>	

TAHAP ANALISIS

Tahap Satu: **Pendahuluan** berisi landasan kebijakan mengenai peranan TKPK dan penyusunan dokumen SPKD (Perpres 15 dan Permendagri no 42). Selain itu perlu menjelaskan apakah dokumen SPKD mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur. Pada Tahap ini akan lebih banyak menggunakan alat analisis Literatur review.

Tahap Dua: **Kondisi Umum Daerah** berisi kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya terhadap kondisi kemiskinan di daerah.

Tahap Tiga: **Profil Kemiskinan Daerah** dimulai dari penjelasan tentang definisi dan konsep kemiskinan.

Tahap Empat: **Determinan Kemiskinan Daerah.** Tahap ini menjelaskan tentang bagaimana menemukan akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi pada setiap bidang.

Tahap Lima: **Analisis APBD** untuk Penanggulangan Kemiskinan berisi penjelasan tentang komposisi APBD berdasarkan Pendapatan dan Belanja.

Tahap Enam: **Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan** Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berisi penjelasan tentang pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara nasional (per-klaster).

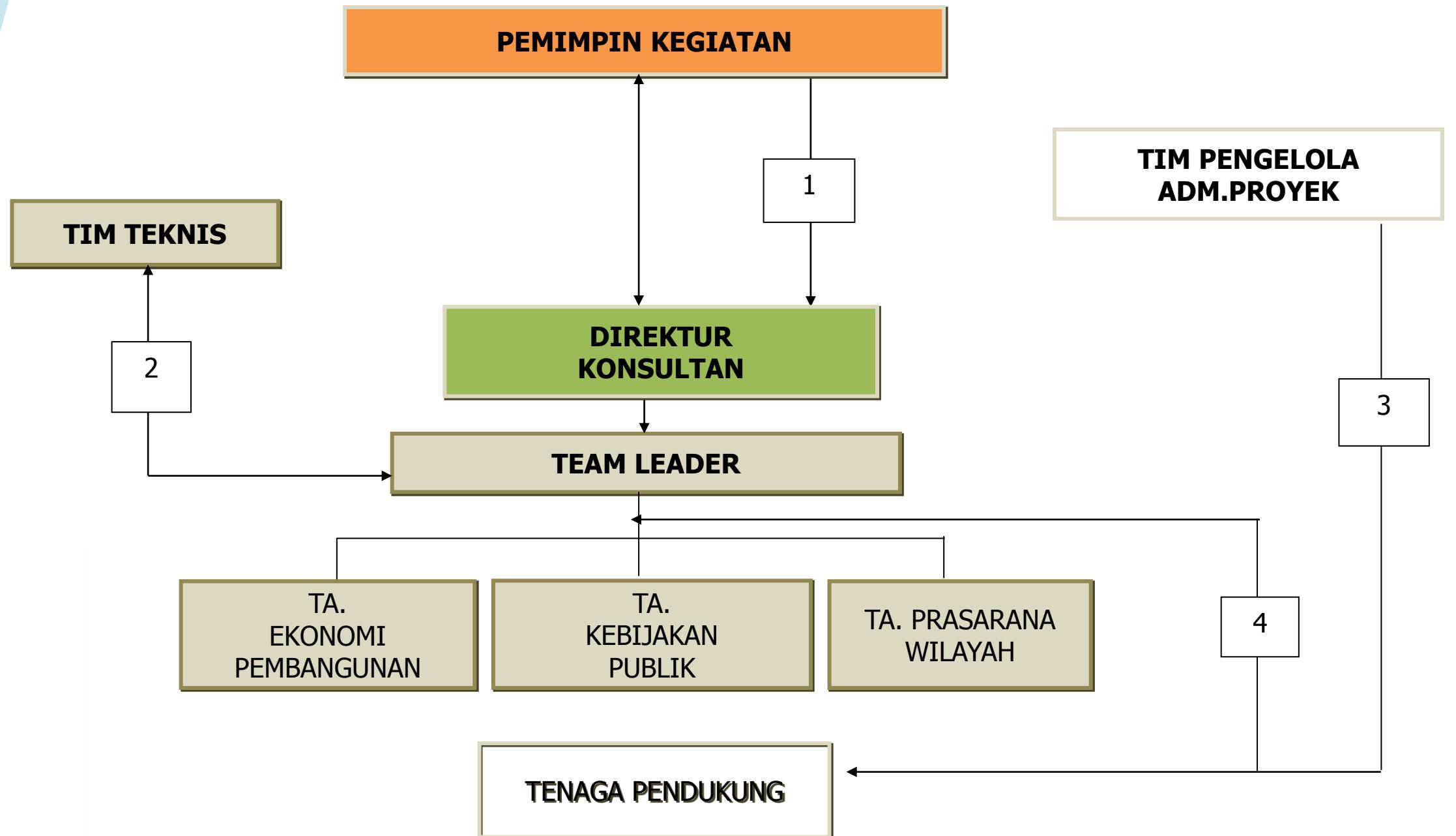
Tahap Tujuh: **Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah** berisi rumusan isu strategis yang secara eksplisit menerangkan tentang masalah yang akan ditangani, intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan konteks dimana permasalahan terjadi.

Bagian Delapan: **Sistem Monitoring dan Evaluasi** menjelaskan tentang bagaimana sistem monitoring dan evaluasi dapat memastikan program terpantau dalam pelaksanaannya sehingga efektifitas program lebih terjamin.

RENCANA JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Bulan	I				II				III			
		Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Persiapan												
	a. Koordinasi tim (internal)												
	b. Konsolidasi tim dengan Pemberi Pekerjaan												
	c. Penyusunan design pelaksanaan pekerjaan												
	d. Koordinasi dg instansi terkait												
II	LAPORAN PENDAHULUAN												
	a. Pengumpulan data awal												
	b. Kajian dan pengolahan data awal												
	c. Penyusunan Laporan Pendahuluan												
	d. Penyerahan draft laporan pendahuluan												
	e. Pembahasan draft laporan pendahuluan/Seminar Awal												
	f. Revisi dan Finalisasi laporan pendahuluan												
III	LAPORAN AKHIR												
	a. Survey primer dan sekunder (penajaman data)												
	b. Kompilasi data dan pengolahan data												
	c. Kajian dan analisis data												
	d. Penyusunan draft laporan akhir												
	e. Penyerahan draft laporan akhir												
	f. Pembahasan draft laporan akhir/Seminar Akhir												
	g. Revisi dan Finalisasi laporan akhir												
	h. Penyerahan Laporan Final												

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONIL



Keterangan jalur hubungan komunikasi :

1: Kontrak/ Garis Kerja Sama
2: Komunikasi Teknis Extern

3: Komunikasi Administrasi
4: Komunikasi Teknis Intern

PELAPORAN & KELUARAN

SISTEM PELAPORAN

Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi tentang proses-proses terkait dengan Tahap Persiapan, Penyusunan program design, Metode Penelitian, dan jadwal pelaksanaan kegiatan (*time schedule*).

Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan perbaikan dari konsep draf laporan akhir setelah melalui proses konsultasi dengan pengguna jasa dan masukan-masukan dalam seminar hasil penelitian, laporan akhir diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

KELUARAN

- a) Deskripsi tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b) Inventarisasi potensi lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c) Deskripsi peran stakeholders lokal masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d) Program aksi dan arahan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**SEKIAN
TERIMAKASIH**

